



PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA CIKAOBANDUNG PURWAKARTA

Lusi Octaviyanti, Haura Atthahara, Lina Aryani

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Keikutsertaan seseorang di dalam sebuah kelompok sosial untuk mengambil peran dari bagian kegiatan masyarakat yang ada, di luar pekerjaannya merupakan arti dari partisipasi masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa lebih dipahami sebagai kontribusi masyarakat desa yang memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan. Sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional berupa Musrenbang. Dengan adanya Musrenbang ini, rakyat banyak diharapkan untuk bisa turut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pembangunan. Desa Cikaobandung dalam kehidupan pedesaannya dengan segala serangkaian perumusan pembuatan maupun pengambilan keputusan-keputusan, baik mengenai masalah yang besar maupun kecil dalam suatu perencanaan pembangunan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Cikaobandung Purwakarta. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil penelitian itu sendiri ialah tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan prosedur formal pelaksanaan perumusan perencanaan pembangunan yang ada di Desa Cikaobandung, adapun bentuk partisipasi di dalam perencanaan pembangunan desa seperti partisipasi ide dan gagasan yang di sampaikan kepada perangkat Desa Cikaobandung.

Kata Kunci: Musrenbang, Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan.

PENDAHULUAN

Pembangunan ialah salah satu agenda yang sangat penting sedari awal kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada saat tanggal 17 Agustus 1945. Dimana tujuan pembangunan sebagaimana telah terdapat di dalam pembukaan UUD 1945 seperti mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Sehingga proses demokratisasi yang berjalan di Indonesia, masyarakat merupakan unsur yang penting di dalam proses pengambilan pembuatan kebijakan. Masyarakat memiliki peran di dalam berjalannya suatu pembangunan yang ingin dikehendaki. Dewasa ini Otonomi daerah serta di era globalisasi ,pemerintah daerah di haruskan untuk bisa memberikan sebuah sistem pelayanan yang lebih baik serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya.

Sebagaimana pada Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa titik berat otonomi diletakkan pada daerah kabupaten/kota, dengan pertimbangan bahwa daerah kabupaten/kota lebih langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga timbulnya harapan agar dapat lebih mengerti dalam memenuhi aspirasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

Dengan terbentuknya sebuah skema otonomi daerah yang baru, yang tentunya lebih menekankan hak bagi daerah dan urgensi prakarsa masyarakat, menunjukkan seberapa kuatnya posisi daerah dalam menentukan masalah rumah tangganya sendiri. Agar tujuan pembangunan tercapai maka diharapkan keikutsertaan dan harus melibatkan beberapa elemen didalamnya yang salah satunya elemen yang sangat diharapkan adalah adanya partipasi dari masyarakat yang dapat

mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan..

Penyusunan perencanaan pembangunan nasional maupun perencanaan pembangunan daerah merupakan tujuan di bentuk nya sebuah forum musyawarah masyarakat atau biasa di sebut dengan Musrembang.

Menurut (Supeno, 2005) bahwa masyarakat diwajibkan untuk ikut serta di dalam setiap program perencanaan pembangunan. Maka dari itu persoalan seperti aspriasi masyarakat akan selalu menjadi sebuah pertimbangan yang penting di dalam pengambilan keputusan yang akan di lakukan oleh pemerintah di dalam pembuatan kebijakan.

Di Desa Cikaobandung pengambilan keputusan melalui serangkaian kegiatan merupakan komponen dalam perencanaan pembangunan kehidupan desa.

Model bottom up digunakan dalam perencanaan pembangunan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di penyelenggaraan mursyawarah. Hal tersebut merupakan hal dasar permasalahan yang terjadi di dalam bentuk dari pastipasi masyarakat.

Selain itu juga baik di dalam musyawarah perencanaan pembangunan, hambatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan, upaya aparatur desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Cikaobandung ,maka penulis mengangkat judul penelitian “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Cikaobandung”

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan sebuah metode penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif berfokus pada latar belakang alamiah secara holistik dan memposisikan

makhkuk hidup seperti manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang dinilai bisa menjawab sebuah masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, penggalan dokumen.

Lokasi penelitian yang diambil penulis berhubungan dengan kebutuhan data pendukung penelitian, maka dari itu penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Desa Cikaobandung dan masyarakat di lingkungan Desa Cikaobandung yang terletak di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Jawa Barat. Waktu penelitian berlangsung pada bulan mei 2021 dengan harapan memperoleh hasil yang optimal dalam melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis akan yang menjadikan fokus pada penelitian ini tentang mengenai Bentuk partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Hambatan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Cikaobandung Purwakarta.

Dalam penelitian ini penulis menjawab permasalahan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara serta dengan mengumpulkan data-data yang terdapat di lapangan.

Partisipasi staf Desa Cikaobandung di dalam proses pencarian data dan informasi sangat membantu penulis untuk bisa mendapatkan pemahaman dari permasalahan.

Penanggung Jawab Kepala Desa Cikaobandung Purwakarta dan Masyarakat Desa Cikaobandung Purwakarta, beserta Dokumentasi berupa dokumen-dokumen yang mendukung penelitian. Tujuannya diharapkan dapat menjabarkan dengan baik tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan temuan dalam suatu proposal dan/atau laporan penelitian diperlukan pemahaman yang baik tentang masing-masing konsep tersebut sehingga dapat menghasilkan data yang sesuai dengan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Cikaobandung Purwakarta

Keikutsertaan masyarakat di dalam urusan kegiatan pemerintahan merupakan termasuk bentuk dari partisipasi masyarakat. Sebagaimana mestinya Indonesia merupakan Negara yang demokratis dimana segala hal yang menyangkut keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah telah di tata sedemikian rupa. Termasuk juga partisipasi masyarakat desa. Masyarakat desa berhak untuk menyampaikaikan aspirasi. Didalam pelaksanaanya masyarakat desa untuk menyampaikan segala aspirasi tersebut di wakilkkan oleh perangkat desa yaitu RT dan RW.

Partisipasi menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba (1963) dalam Dacombe (2018:23) ialah suatu tindakan mengambil fokus yang secara sadar memposisikan analisis karakteristik individu dalam tindakan kolektif. Tidak hanya ini, tetapi argumen yang mereka buat sangat menekankan pada manfaat bagi kehidupan demokrasi dari norma-norma kolektif yang terkait dengan pengetahuan dan kepentingan politik,

kepercayaan dan kepercayaan dalam politik dan di atas semua itu, keefektifan lembaga-lembaga demokrasi.

Adapun menurut (Sundariningrum) dalam (Sugiyah, 2001) terbentuknya partisipasi menjadi 2 berdasarkan cara keikut sertaanya yaitu :

A. Partisipasi Langsung

Menurut (Sundariningrum) dalam (Sugiyah, 2001) adanya suatu kegiatan tertentu ialah tertentu merupakan definisi dari partisipasi. Partisipasi ini terlaksana ketika etiap individu mengemukakan pendapat atau pandangan yang membahas pokok permasalahan setelah itu mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. Dalam penelitian ini bentuk partisipasi masyarakat di dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Cikaobandung Purwakarta di selenggarakan

1 tahun sekali hal tersebut menjelaskan bahwa adanya bentuk partisipasi langsung.



Sumber : BPKP RI

Gambar 1.1 Alur Partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan

Dalam gambar diatas bahwa masyarakat dapat terlibat melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa Cikaobandun, mulai dari tampung aspirasi yang disampaikan kepada RT/RW hingga sampai ke tahap perencana pembangunanatas hasil aspirasi dari kegiatan musyawarah sehingga dengan adanya partisipasi dari

elemen terbawah dapat memberikan hasil terbaik bagi pembangunan Desa Cikaobandung. Setelah RT dan RW menampung aspirasi dari masyakat maka tahap selajutnya itu musyawarah perencanaan pembangunan desa atau biasa disebut MusrebangDes. Hasil dari kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau bisa disebut MusrebangDes ini akan menghasilkan sebuah ouput berupa sebuah program. Program tersebut merupakan hal yang di butuhkan oleh masyarkat desa cikaobandung itu sendiri.

B. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Dalam penelitian ini peneliti dapat menarik hasil penelitian bahwa terdapat pasrtisipasi tidak langsung yaitu bentuk partisipasi yang di jalankan yaitu partisipasi akan disampaikan di 22 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Selanjutnya pasrtisipasi masyarakat di Desa Cikaobandung dalam bentuk tidak langsung, dimana dalam hal ini masyarakat memberikan kepercayaan dan mandat kepada ketua RT/RW di Desanya.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat mengambil dan menentukan suatu program perencanaan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang nantinya hal ini akan disampaikan oleh Ketua RT/RW dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Cikaobandung. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, RT/RW menjadi perwakilan dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi yang akan dibahas dalam MusrenbangDes tersebut. Setelah adanya keputusan dari RT/RW ,akan dirangkum dalam MusrenbangDes dari setiap desa disepakati yang lebih dibutuhkan atau adanya skala prioritas.

Skala prioritas ini berpaku kepada Peraturan Menteri Desa. Keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Cikaobandung Purwakarta sangat dapat meentukan apakah di dalam pelaksanaan pembangunan telah sesuai dengan rencana dan hasil dari perencanaan yang telah di tentukan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang tidak atau tidak berperan dalam pengambilan keputusan maka pasrtisipasi masyarakat akan berkurang.

Hambatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan di Desa Cikaobandung

Keterlibatan masyarakat yang terlibat atau dikenal dengan partisiapasi masyarakat dalam terlaksananya musyawarah pembangunan tak terleas dengan hambatan yang terjadi didalamnya, Pengoptimalan semua elemen dapat terciptanya partisipasi yang baik Sehingga tidak adalagi hambatan bagi masyarakat desa untuk bisa ikut serta dalam pastisipasi dalam perencanaan pembangunan desa.

A. Terdapat Pro Kontra yang terjadi di Masyarakat.

Tahapan partisipasi didalamnya terdapat kesenjangan dalam program yang telah di tetapkan yaitu terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat dalam adu gagasan. Salah satunya itu pada program pemindahan lahan kuburan yang

sudah ada di jaman colonial belanda yang dialih fungsikan menjadi jalan untuk kereta cepat dan hal ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat desa cikaobandung. Menurut Pjs. Kepala Desa Cikaobandung Purwakarta, bahwa yang terjadi kontra di masyarakat desa cikaobandung ini dilatarbelakangi masyarakat cikaobandung masih memegang kepercayaan bahwa jika makam tersebut

dipindahkan maka akan terjadi sesuatu yang buruk di desa cikaobandung. Akan tetapi didalam pelaksanaanya sudah sesuai dengan prosedur sehingga program pemindahan lahan makam ini terlaksana dengan baik.

B. Adanya wabah Virus Corona

Hambatan selanjutnya yaituhambatan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa yaitu adanya wabah virus covid-19 dimana yang seharusnya aparatur desa melaksanakan program yang telah ditentukan dari musyawarah perencanaan pembangunan desa dialihkan menjadi penanganan dan penanggulangan wabah covid-19 yang berujung penundaan program dari musyawarah perencanaan pembangunan desa tersebut.

Upaya Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Cikaobandung.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Cikaobandung ada beberapa yang malas ikut serta dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Berdasarkan strategi timing. Bahwa dapat dikatakan sebagai mendasari tindakan yang mana kegiatan tersebut ataupun usaha mengarah kepada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan, yang berasal dari suatu pemerintahan desa, kondisi persaingan dan lingkungan yang selalu berubah memili tujuan yang telah di tentukan Masyarakat Desa dan pemerintahan desa menyadari dalam kehidupannya aka saling ketergantungan antar sesamanya diimplementasikan dalam partisipasi diwakilan oleh RT dan RW sehingga masyarakat desa

Cikaobandung selalu berusaha untuk memelihara hubungan yang baik dengan sesamanya. Kepala Desa cikaobandung belum bisa meningkatkan partisipasi sebagai cara untuk memelihara hubungan legitimasi dan kepercayaan masyarakat cikaobandung karena kepala desa adalah pilihan bupati purwakarta, Anne Ratna Mustika. Jabatan Kepala Desa Cikaobandung diserahkan dari Pupung Puryanti kepada Pejabat sementara Kepala Desa Hendra Setiawan tanpa proses demokrasi sehingga legitimasi dan kepercayaan masyarakat cikaobandung rendah. Selain itu, pemerintah desa cikaobandung tidak melakukan kegiatan musrembang secara online.

Pengembangan desa digital dilakukan pemerintah desa cikaobandung belum bisa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat desa. Desa cikaobandung memiliki relatif kesulitan sinyal internet sehingga desa ini menjadi salah satu pelosok Indonesia ini perlu perhatian khusus. Hal ini juga bisa menghambat perkembangan musrembang secara online dan jaringan internet disini sehingga keterbukaan informasi belum sepenuhnya bisa dinikmati masyarakat desa cikaobandung. Aparatur Desa harus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa cikaobandung dengan langkah sebagai berikut:

- A. Meningkatkan infrastruktur internet untuk musrembang online atau emurembang di desa cikaobandung
- B. Melaksanakan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 79 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (pilkades)
- C. Pelaporan hasil musrembang kepada masyarakat desa cikaobandung secara digital.

- D. Pembuatan website pemerintah desa cikaobandung untuk keterbukaan informasi.

Adapun macam cara yang ada cara yang paling terbaik ialah bukan yang dapat ditetapkan dengan pasti, hal ini dikarenakan adanya sesuatu akan sangat bergantung kepada situasi maupun kondisi yang terjadi di desa cikaobandung yang pada fakta yang terlihat masih tertinggal. Solusi yang di nilai tepat untuk suatu situasi dan kondisi, yaitu di wajibkannya untuk mengikut sertakan semua komponen atau unsur secara langsung di dalam proses pembuatan perencanaan dan pengambilan sebuah keputusan disertakan dengan memberikan fasilitas dan kepala desa yang memiliki pengaruh. Kepala desa cikaobandung tidak akan bisa menjalankan secara mandiri terlebih pada perencanaan dan keputusannya, sehingga perencanaan dan keputusan yang baik itu hanya berbentuk lembaran saja. Proses pembuatan perencanaan dan pengambilan keputusan sebaiknya untuk mengikutsertakan semua unsur yang ada. Sehingga perencanaan dan keputusan yang akan dibuat menjadi lebih baik, sebab akan mendapatkan masukan atau bahan-bahan dari semua unsur yang terdapat perannya. Dengan begitu semua unsur akan menimbulkan semangat dalam melaksanakan tugas-tugasnya dikarenakan masyarakat merasa dibutuhkan dalam hal proses pembuatan dan pengambilan keputusan berdasarkan kepentingan warga Desa Cikaobandung.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (MusrembangDes) di desa cikaobandung dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat

dalam bentuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Cikaobandung Purwakarta yaitu partisipasi langsung antara ketua RT/RW. Masyarakat dan ketua RT/RW bermusyawarah untuk menentukan apa yang ingin atau akan dibangun untuk masyarakat sekitar yang nantinya akan disampaikan di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Dimana hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan desa berupa sebuah program yang mana program tersebut merupakan wujud dari aspirasi dari masyarakat desa cikaobandung tersebut. Adapun terjadinya hambatan hal itu terjadi disaat di dalam pelaksanaan program dari musyawarah perencanaan pembangunan desa yang masih menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat desa cikaobandung, masih menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat desa cikaobandung. Solusi dari permasalahan tersebut dengan menggunakan strategi timing senbagai tindakan yang mengarah pada kegiatan atau usaha musyawarah perencanaan pembangunan, dari suatu pemerintahan desa, dalam kondisi persaingan dan lingkungan yang selalu berubah agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Sehingga program musyawarah perencanaan pembangunan desa tersebut masyarakat cikaobandung akan merasakan manfaat dari program tersebut. Kepala Desa cikaobandung belum bisa meningkatkan partisipasi sebagai cara untuk memelihara hubungan legitimasi dan kepercayaan masyarakat cikaobandung karena kepala desa adalah pilihan bupati purwakarta, Anne Ratna Mustika. Jabatan Kepala Desa Cikao Bandung diserahkan dari Pupung Puryanti kepada Pejabat sementara Kepala Desa Hendra Setiawan tanpa proses demokrasi sehingga legitimasi dan kepercayaan masyarakat cikaobandung rendah

UCAPAN TERIMAKASIH

Selama proses penelitian yang berlangsung pada bulan Mei 2021, mahasiswa mendapatkan bimbingan dan arahan dari pihak Pemerintah Desa Cikaobandung. Peneliti berkesempatan untuk terjun langsung dan menimba ilmu terkait proses penyelenggaraan pemerintahan selama pandemi covid 19 dengan hasil penelitian maksimal. Pada laporan penelitian akan dijabarkan deskripsi kami mengucapkan terimakasih atas kelancaran kegiatan penelitian di desa Cikaobandung tidak terlepas dari berbagai pihak, yaitu:

1. Pjs Kepala Desa Cikaobandung : Hendra Setiawan, S.M yang telah membeikan informasi dan data sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Masyarakat Desa Cikaobandung : Sutisna, S.H.,M.H yang telah memberikan informasi mengenai pengalaman dan pendapat mengenai kegiatan pasrtisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah :

Azhar, Fikri. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Kebijakan dan Manajemen Publik. Volume 3, Nomor 2.

Fadil, Fathurrahman. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal. Volume II Edisi 2.

Mulyadi, Mohammad. (2011). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. Jurnal Studi Komunikasi Dan Media. Vol 15. No 1.

Mustanir, Anwar (2018). Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongnge

Kecamatan Baranti Kabupaten
Sidenreng Rappang. Jurnal Ilmiah Clean
Government. Vol. 2, No. 1

Rosaliza, Mita. (2015). Wawancara
Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian
Kualitatif. Jurnal Ilmu Budaya. Vol 11. No 2.

Buku :

Arikunto, Suharsimi. (2000). Prosedur
Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta:
Rineka Cipta.

Bintaro, R. (1968). Buku Penuntun
Geografi Sosial. Yogyakarta: UP Spring

Nurcholis, Hanif. (2011). Pertumbuhan
& Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta
Penerbit Erlangga.

Setiadi, E. M & Kolip, U. (2011).
Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan
Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi, dan
Pemecahan Masalahnya.

Jakarta : Penerbit Kencana.
Suardeyasari. 2010. Metode Penelitian
Kualitatif. Jakarta: PT Gramedia.

Sari, Dian Shinta, dan Desi Sri Astuti.
(2018). Persepsi Mahasiswa Terhadap Metode
Pembelajaran Dosen. Jurnal Pembelajaran
Prospektif. Vol 3. No 1.

Peraturan

Peraturan Permendagri No. 66 Tahun
2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa